

ABSTRAK

KONTRIBUSI PT. KERETA API INDONESIA (PT. KAI) TERHADAP PENERIMAAN NEGARA SETELAH PRIVATISASI

Oleh

Zelni Permatasari

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamanatkan tujuan pendirian BUMN untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu BUMN yang melaksanakan fungsi ekonomi suatu BUMN yaitu mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang nantinya bagian dari hasil keuntungan tersebut akan disumbangkan pada pos penerimaan negara atas bagi laba BUMN. Sedangkan dalam dimensi sosial keberadaan PT. Kereta Api Indonesia adalah manifestasi pelayanan, distribusi, dan pengelolaan demi pemenuhan hajat hidup masyarakat banyak agar tercapai kesejahteraan. PT. Kereta Api Indonesia dituntut agar dapat menjalankan peran ekonomi dan sosialnya tersebut secara maksimal dan seimbang sehingga PT. Kereta Api Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan privatisasi yang dilaksanakan pada PT. Kereta Api Indonesia terhadap kontribusi penerimaan negara atas bagi laba BUMN, dan seberapa besar kontribusi laba yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia pada penerimaan negara atas bagi laba BUMN. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan privatisasi yang dilaksanakan pada PT. Kereta Api Indonesia terhadap kontribusi penerimaan negara atas bagi laba BUMN, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi laba yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia pada penerimaan negara atas bagi laba BUMN. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif .

Selama tahun 2002-2008 (tahun penelitian) yaitu setelah dilakukan kebijakan privatisasi, PT. Kereta Api Indonesia telah memberikan kontribusi yang optimal untuk meningkatkan penerimaan negara atas bagi laba BUMN. Hal ini terlihat pada rata-rata peningkatan penerimaan negara pada pos penerimaan yang berasal dari bagian laba BUMN terutama pada tahun 2006 yang mengalami peningkatan secara efektif yaitu sebesar 119,8% dari tahun sebelumnya dan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 2,67%. Selain itu keberadaan PT. Kereta Api Indonesia dalam dimensi ekonominya telah mencapai sasaran atas implementasi kebijakan privatisasi yang dilakukan pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan privatisasi ini berhasil secara umum.

Dan dengan adanya kebijakan privatisasi tersebut berarti kepemilikan pemerintah dalam PT. Kereta Api Indonesia berkurang, tetapi berkurangnya kepemilikan ini tidak berarti penerimaan pemerintah atas bagian laba BUMN juga ikut berkurang. Justru dengan berkurangnya kepemilikan pemerintah atas saham PT. Kereta Api Indonesia membuat penerimaan pemerintah meningkat.